

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PKO PBB dibentuk dengan UN Charter Tahun 1945 untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam menjalankan mandatnya, PKO menerapkan tiga prinsip utama yaitu persetujuan para pihak, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekerasan kecuali untuk mempertahankan diri dan mandatnya. Hingga saat ini, telah terdapat tiga generasi PKO. Generasi Pertama dikirimkan untuk menjaga batas wilayah dan *buffer zone* setelah Perang Dingin dan bersifat *non-enforcement*. Sedangkan generasi kedua dikirimkan untuk menyelesaikan konflik etnis setelah Perang Dingin berlangsung dan boleh menggunakan senjata. Kemudian, generasi ketiga sering disebut PKO multidimensional dimulai setelah diterbitkannya Laporan Brahimi dan lebih berfokus pada keamanan masyarakat.
2. Dalam menjalankan tugasnya, PKO PBB membutuhkan dana operasional yang diatur di dalam Pasal 17 UN Charter dimana Majelis Umum akan menyetujui anggaran organisasi termasuk PKO dari iuran negara-negara anggota. Kemudian anggaran tersebut akan diawasi oleh *Fifth Committee*. Anggaran tahunan tersebut digunakan dalam satu tahun finansial dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juni. Selain dari anggaran tahunan PBB, PKO juga dapat mendapatkan dana dari negara anggota melalui donasi sukarela yang disalurkan oleh badan PBB bernama

Voluntary Trust Fund. Prinsip pendanaan yang digunakan PBB meliputi: prinsip tanggung jawab kolektif, perbedaan prosedur dalam membiayai organ-organnya, negara dengan ekonomi maju berkontribusi lebih besar daripada negara dengan ekonomi yang lebih rendah, prinsip tanggung jawab spesial untuk anggota tetap DK-PBB, dan konsiderasi spesial untuk negara anggota yang menjadi korban. PBB menggunakan sistem transparansi publik dalam meningkatkan akuntabilitasnya melalui website resmi dan dokumen-dokumen yang dipublikasikan. Dalam mempublikasikan dokumen-dokumennya, PBB menggunakan sistem multilingualisme 6 Bahasa resmi yaitu Bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Selain itu, negara kontributor PKO PBB juga dapat mengawasi operasionalisasi PKO melalui *The Special Committee on Peacekeeping Operations (C34)* dengan luaran berupa laporan tahunan. Meskipun demikian, kinerja Komite C34 masih dirasa kurang efektif karena tidak ada dasar hukum yang memberikan Komite C34 wewenang resmi untuk merekomendasikan suatu saran. PBB juga menerapkan evaluasi institusional sebagai salah satu metode akuntabilitasnya melalui enam badan evaluator yaitu JIU, OIOS, BOA, IAAC, DPET dan CPC. JIU terdiri dari berbagai macam inspektur yang akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap sistem PBB. Luaran dari hasil inspeksi JIU berupa laporan akhir, catatan, atau *confidential letter*. Kemudian, OIOS bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga internal mengenai staf organisasi dan sumber daya. Laporan inspeksi

dan evaluasi OIOS tersebut akan dipublikasikan selama 30 hari setelah penerbitan. Selanjutnya, BOA juga bertugas mengawasi secara independen dan bertanggungjawab kepada Majelis Umum melalui ACABQ. BOA tidak memiliki hak untuk melakukan pengawasan operasional, melainkan melakukan audit finansial, *compliance*, dan analisis performa. Kemudian IAAC merupakan lembaga pengawasan independen yang berperan dalam fungsi *advisory* atau memberi saran. IAAC bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap Majelis Umum mengenai: (i) hasil dan efektivitas dari badan audit dan pengawasan, terutama OIOS; (ii) memastikan kepatuhan manajemen dari rekomendasi badan pengawasan dan audit lainnya; (iii) mengenai manajemen risiko, kontrol internal, operasional, laporan keuangan dan permasalahan *accounting disclosure*; dan (iv) meningkatkan kerjasama antar lembaga pengawasan PBB. Terdapat suatu badan yang berfungsi dalam evaluasi, yaitu DPET. Dalam melaksanakan evaluasi, Tim Evaluasi bekerjasama dengan Divisi Evaluasi dan Inspeksi dari *Office of Internal Oversight Services* (OIOS) dan *Office of Peacekeeping Strategic Partnership* of DPO. Luaran dari hasil evaluasi DPET adalah *after-action reviews* (AAR) yang dapat diakses oleh publik. Terakhir, yaitu CPC yang memiliki fungsi untuk melakukan review dan menyetujui rancangan kerja tahunan departemen.

B. Saran

Mekanisme akuntabilitas akan lebih efektif dengan adanya sistem *check and balance* tidak hanya dari segi internal organisasi tetapi juga dari masyarakat internasional. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini beberapa saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan uang untuk pendanaan PKO PBB, yaitu:

1. Terhadap Majelis Umum PBB, meskipun sistem PBB saat ini telah mempublikasikan semua bentuk dokumen yang ada, tetapi terdapat beberapa dokumen yang tidak dipublikasikan, termasuk rancangan peraturan yang hendak dibuat. Padahal dokumen dan informasi penting untuk dipublikasikan agar publik dapat menyadari apabila ada suatu kesalahan maupun hal yang kurang wajar dalam penggunaan dana dan dapat mengkritisi serta memberi masukan atas biaya operasional tersebut. Oleh karena itu, dokumen yang dipublikasikan sebaiknya diperlengkap.
2. Terhadap Dewan Keamanan PBB yang secara langsung menjadi pembuat kebijakan terutama dalam memberikan mandat kepada PKO diharapkan untuk meningkatkan transparansi dalam pembuatan keputusan. Saat ini, negosiasi yang dilakukan dalam proses pembuatan suatu kebijakan selalu dilakukan pada suatu sesi tertutup. Seringkali, proses negosiasi tersebut tidak dicantumkan di dalam dokumen yang dipublikasikan. PBB hanya menyampaikan

luaran dari proses pembentukan kebijakan tersebut tanpa menjelaskan proses dan diskusi yang terjadi di dalamnya. Padahal proses pembuatan kebijakan juga menjadi elemen akuntabilitas yang penting agar publik mengetahui konsiderasi di balik adanya pembuatan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, transparansi dalam proses pembuatan anggaran tahunan penting agar lembaga organisasi lainnya juga memiliki saran untuk menyampaikan aspirasi. Maka dari itu, penting bagi PBB untuk melaporkan proses pembuatan keputusan, baik melalui *press release* maupun media lain yang dapat secara mudah diakses oleh publik.

3. PBB telah memiliki enam badan evaluasi institusional yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi terkait berbagai hal, terutama pendanaan di bidang PKO.

- a. Untuk JIU, penggunaan badan evaluasi institusional yang beragam memiliki konsekuensi tidak ada kurangnya efektivitas akibat kemungkinan tumpang tindih wewenang atau bahkan kekosongan dalam mengevaluasi beberapa hal karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas. Selain itu, meskipun lembaga evaluasi institusional tersebut beragam, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam hal pembuatan kebijakan. Ketidakwenangan tersebut menyebabkan luaran berupa rekomendasi menjadi tidak signifikan karena hanya bersifat

opsional tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan.

Akibatnya, terdapat banyak kasus dimana rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh PKO yang bersangkutan.

- b. Untuk OIOS, terdapat berbagai masalah setelah memberikan rekomendasi terhadap PKO seperti rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Maka dari itu, sebaiknya OIOS mempertimbangkan mengenai mekanisme yang dapat mendorong PKO untuk melaksanakan rekomendasi seperti *review* yang berulang-ulang, batas akhir melaksanakan rekomendasi, dan teguran apabila tidak melaksanakan.
- c. Untuk BOA, luaran yang disusun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga PKO tidak memiliki kewajiban untuk menerapkannya. Akibatnya, terdapat berbagai rekomendasi yang bersifat *tokenistic* dan tidak memberikan perubahan yang positif. Hal ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan unsur mengikat dari rekomendasi yang diberikan sehingga meningkatkan efektifitas.
- d. Untuk IAAC, rekomendasi yang diberikan untuk PKO memiliki tingkat akseptasi yang cukup rendah. Oleh karena itu, IAAC harus lebih memperhatikan mengenai relevansi atau *feasibility* dari rekomendasi yang diberikan.
- e. Untuk DPET, perlu adanya evaluasi rutin mengenai pembelajaran internal untuk memastikan *peacekeepers*

benar-benar menggunakan waktunya untuk mempelajari, mengerti, dan memahami materi pelatihan yang diberikan.

f. Untuk CPC, upaya mengeliminasi program kerja yang sudah tidak relevan seharusnya tidak hanya berdasarkan kondisi saat itu, tetapi juga berdasarkan *forecast* di masa depan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan keputusan.

4. Untuk Majelis Umum PBB, hingga PKO Generasi III, PBB tidak memiliki panduan dan regulasi yang jelas dalam hal anti-korupsi di dalam misi perdamaian dan operasi. Hal ini terjadi karena isu korupsi masih belum dianggap sebagai isu yang utama. Padahal dalam mewujudkan perdamaian dan pemenuhan mandat, dibutuhkan komitmen agar para *peacekeepers* tidak melakukan hal yang melanggar hukum dan merugikan suatu pihak. Sangat penting untuk menegakkan regulasi yang lebih kuat dalam hal anti-korupsi untuk meminimalisir resiko *financial loss* dan meningkatkan efektivitas dari PKO.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Economic and Social Council. (1996). "Consultative relationship between the United Nations and non-governmental organizations", ECOSOC Resolution 1996/31. Diakses dari: <https://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm>
- Repertoire of the Practice of the Security Council*. (1996). Chapter VIII. Consideration of questions under the responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security. Decision of 30 August 1996 (3693rd meeting). Statement by the President At its 3689th meeting
- Statute of the Joint Inspection Unit*. (1976).
- United Nations. (2000). *Regulations and Rules Governing Programme Planning, the Programme Aspects of the Budget, the Monitoring of Implementation and the Methods of Evaluation*. Secretary-General's bulletin. (ST/SGB/2000/8).
- United Nations Charter. (1945).
- United Nations ECOSOC. (1961). *Resolution 920 (XXIV)*
- United Nations General Assembly. *Resolution No. (45/248 B (VI))*.
- United Nations General Assembly Resolution 2006 (XIX)*. (1965).
- United Nations General Assembly. *Resolution A/60/608*. Art. XIII
- United Nations General Assembly Resolution A/RES/48/218 B
- United Nations General Assembly. *Resolution A/RES/55/236*. Voluntary movements in connection with the apportionment of the expenses of United Nations peacekeeping operation.
- United Nations Document. *General Assembly Resolution A/RES/55/231. Results-Based Budgeting*.
- UN General Assembly Resolution 64/259. (2010). (UN Doc. A/RES/64/259).
- United Nations Security Council Resolution S/RES/2378. (2017). Adopted by the Security Council at its 8051st meeting, on 20 September 2017
- United Nations Security Council. (2013). Resolutions 2086
- United Nations Security Council. (2000). *Resolution 2378*.
- The Geneva Conventions. (1949).
- The Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Germany, The Protocol annexed thereto, the agreement respecting The military occupation of the territories of the Rhine, and the Treaty Between France and Great Britain Respecting Assistance to France in the event of unprovoked Aggression by Germany. Treaty of Versailles*.

Jurnal

- Aloyo, E. (2015). Just War Theory and the Last of Last Resort. *Ethics & International Affairs*, Vol. 29(2), p.187-201. doi:10.1017/S0892679415000064
- Amos Sipatuhar. (2022). Logistic Support in Order To Guarantee The Operational Readiness On Peace Keeping Operation In Lebanon (Case Study On Mechanized Battalion Task Force Xxiii-M 2018-2019). *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*. Vol.8. No.1. p.67-94. DOI:10.33172/jspd.v8i1.1057
- Azar Gat. (2009). So, Why Do People Fight? Evolutionary Theory and the Causes of War. *European Journal of International Relations*. Tel Aviv. Vol. 15(4). p.571–599. DOI: 10.1177/1354066109344661
- Azham Ali & Hamidah Yusof. (2011). Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*. Vol. 5. Issue (1/2).
- Chuck Thiessen & Marwan Darweish. (2018). Conflict resolution and asymmetric conflict: The contradictions of planned contact interventions in Israel and Palestine. *International Journal of Intercultural Relations*. Vol. 66. pp. 73-84. Diakses dari: <https://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.06.006>
- Dean G. Pruitt & Rubin, J. Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Femke Brandt & Grasian Mkodzongi. (2018). *Land Reform Revisited: Democracy, State Making and Agrarian Transformation In Post-Apartheid South Africa*. Boston. Brill Sense and Hotei Publishing.
- Faralita. et al. Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara. *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2018. DOI:<https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1>.
- Fumiyuki Kobashi. (2013). A Perspective on Improvement of Accountability in United Nations Peacekeeping Operations. *Japan Peacekeeping Training and Research Center*. Diakses dari: <https://www.mod.go.jp/js/jsc/jpc/english/index.html>
- Hugh Miall. (2004). “Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task” Chapter in *Transforming Ethnopolitical Conflict*. Berlin. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-05642-3_4
- I Nyoman Sudira. (2015). Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*. Vol. 11. No. (1). p.21-32
- Johan Galtung. (1976). Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. *Impact of science on society*. Vol.XXVI. p.103-115. Diakses dari: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000017295.locale=en>

- Liv Sävström. (2010). *"The Development of UN Peacekeeping: A study of human security and robustness in peacekeeping then and now"*. Malmö Uni
- M. Prakoso Aji & Jerry Indrawan. (2019). Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 9. No. 3, 2019, pp. 65-84 doi:10.33172/jpbh.v9i3.637.
- Marco Odello. (2010). Tackling Criminal Acts in Peacekeeping Operations: The Accountability of Peacekeepers. *Journal of Conflict & Security Law*. Vol. 15, No. 2. pp. 347-391. Oxford University Press
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research Using Qualitative, Quantitative Or Mixed Methods And Choice Based On The Research. *Perfusion*. Vol. 30. p.537-542. DOI: 10.1177/0267659114559116
- Michael N Schmitt. (2003). International Law and the Use of Force: The Jus Ad Bellum. *Connections*, 2. Vol. 3. p.89-97. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/26323011>
- Merriam Webster Dictionary. Resolution. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/resolution>
- Pal Ahluwalia & Toby Miller. (2016). Why do wars happen? Social Identities. *Journal for the Study of Race, Nation, and Culture*. Vol 22:4. p.347-349. DOI: 10.1080/13504630.2016.1158952
- Ralf Dahrendorf. (1958). Toward A Theory Of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 2. Issue. 2. p.170-183. <https://doi.org/10.1177/002200275800200204>
- Ross Fetterly. (2006). A Review of Peacekeeping Financing Methods. *Defence and Peace Economics*. Vol. 17. Issue. 5. p.395-411. DOI: 10.1080/10242690600888189
- Soeharno. (2012). *"Kebijakan Publik Berbasis Rekognisi : Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan Daerah"*.
- Teguh Sulistia. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 4. No. 3. Art. 5. DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.157. p.526-555. Diakses dari: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss3/5>
- Yohei Okada dan Nigel D. White. (2020). Overcoming the Hurdles to Accountability in UN Peacekeeping Introduction to the Special Issue. *Journal of International Peacekeeping*. Vol. 23. Issue: (3-4). p.117-120. DOI: <https://doi.org/10.1163/18754112-02303001>
- Ziad Abuzayyad. (2014). Israel And Palestine – Last Chance for the Bilateral Process. *Palestine-Israel Journal*. Vol. 19. No. 3. Diakses dari: <https://pij.org/articles/1536>

Buku

- Alo Liliweri & Muhammad Al - Fayyadl. (2005). *“Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur”*. Yogyakarta. LKIS.
- An Assessment of Corruption Risks in UN Peace Operations*. 2019. Transparency International Defense and Security
- Antonius. Et al. (2002). *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta. Ghalian Indonesia.
- Arthur O'Sullivan & Steven M. Sheffrin. (2003). *“Economics: Principles in action”*. Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Prentice Hall. p. 324. ISBN 978-0-13-063085-8.
- Bagong Suyanto J & Dwi Narwoko. (2004). *“Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”*. Jakarta. Kencana Media Group.
- Baljit Grewal & John Galtung. (2003). *Positive and Negative Peace*. Auckland University of Technology.
- Beatrice Pouligny. (2006). *“Peace Operations Seen from Below: UN Missions and Local People”*. London. C. Hurst & Co. Ltd.
- Cedric Thornberry. (1996). *“Peacekeepers, Humanitarian Aid and Civil Conflicts. In: Whitman, J and Pocock, D. ed. After Rwanda: The Coordination of United Nations Humanitarian Assistance”*. Ipswich. Ipswich Book Co Ltd.
- Corruption & Peacekeeping. (2013) *“Strengthening peacekeeping and the United Nations”*. Transparency International UK
- Daniel Levine. (2010). *Peacekeeper Impartiality: Standards, Processes, and Operations.* Report of Center for International & Security Studies. U. Maryland, 2010. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/resrep05019>. p
- Deutsch. Et al. (2016). *“Handbook Resolusi Konflik”*. Bandung. Nusa Media
- Dominick Donald. (2003). *“Neutral is Not Impartial: The Confusing Legacy of Traditional Peace Operations Thinking.”* Armed Forces and Society. p.421-430.
- Eben A Weitzman & Patricia Flynn Weitzman. (2000). *Problem Solving and Decision Making in Conflict Resolution* in M. Deutsch & P. T. Coleman (Eds.), *The handbook of conflict resolution: Theory and practice*. pp. 185–209. Jossey-Bass/Wiley.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. P.951-975
- Erwin Schmild. (2000). *“Peace Operations Between War and Peace”*. London. Frank Cass
- Francis. Et al. (2002). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta. Quills
- Gayle Mindes. (2006). *“Teaching Young Children Social Studies”*. California. Praeger Publishers.
- Judy Cheng-Hopkins. (2010). *“UN Peacebuilding: An Orientation”*. Peacebuilding Support Office. p.7-17

- Kamarulzaman Askandar. (2002). *"Pengelolaan Konflik: Satu Pandang Umum. Makalah"*. Denpasar. Uluangkep Press.
- Louis Kriesberg & Bruce W. Dayton. (2012). *"Constructive Conflicts From Escalation To Resolution"*. Maryland. Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Mary Scannel. (2010). *"The big book of conflict resolution games: Quick, effective activities to improve communication, trust, and collaboration"*. New York. McGraw-Hill. ISBN: 0071742247, 9780071742245
- Martin Leiner & Christine Schliesser. (2018). *"Alternative Approaches in Conflict Resolution Rethinking Peace and Conflict Studies"*. ISBN-13: 978-3319583587.
- Matthew Jackson & Massimo Morelli. (2011). The Reasons for Wars - an Updated Survey. *The Handbook on the Political Economy of War*. p.9
- Michael J. Dziedzic & Len Hawley. (2005). *"Introduction," in The Quest for Viable Peace: International Intervention and Strategies for Conflict Transformation*. Washington DC. United States Institute of Peace Press
- Namie Di Raza. (2020). *"The Accountability System for the Protection of Civilians in UN Peacekeeping"*. International Peace Institute. IPI Publications.
- Oliver Richmond. (2001). *"The Limits of UN Multidimensional Peace Operations. In: Newman, E. and Richmond, O. P. ed. United Nations and Human Security"*. New York. Palgrave.
- Peacebuilding Support Office. (2010). *"United Nations Peacebuilding. An Orientation"*.
- Peacewoman. *Special Committee on Peace-Keeping Operations (C34)*. Diakses dari: <https://www.peacewomen.org/content/special-committee-peace-keeping-operations-c34>
- Peter Wallenstein. (2019). *"Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System"*. Sage Publication. London. 5th Edition. p.232
- Polidano Minogue & Hulme. (1998). *"Beyond the New Public Management :Changing Ideas and Practices in Governance"*. Cheltenham. OECD. Business Sector Advisory Group on Corporate Governance.
- Rames Thakur & Albrecht Schnabel. (2001). *"United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement"*. Tokyo. United Nations University Press.
- Ramsbotham. Et al. (2016). *Contemporary Conflict Resolution*.
- Ronald J. Fisher. (1996). *"Interactive Conflict Resolution"*. New York. Syracuse University Press.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. ISBN: 978-979-769-577-4
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *"Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Terms of Reference for the New/Revised EOSG Posts and Units. (2017). Diakses dari: www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/eosg_terms_of_reference.pdf.

- Teuku May Rudi. (1995). *Organisasi Administrasi dan Internasional*. Bandung. Eresco
- Tommie Sjöberg. (2006). *“From Korea and Suez to Iraq: Half a Century of United Nations Conflict Management”*. Lund. Sekel Bokförlag.
- Trevor Findlay. (2002). *“The Use of Force in UN Peace Operations”*. New York. Oxford University Press
- United Nations Peacekeeping. (2008). *“Principles and Guidelines : Capstone Documents”*. 2008.
- Zisk Marten. (2004). *“Enforcing the Peace: Learning from the Imperial Past”*. New York. Columbia University Press
- Website
- Abu Samman Lubis. (2014). *“Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?”*. BPPK Kemenkeu. Diakses dari: <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149> .
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. *“Konflik Sosial”*. Diakses dari: <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial>
- BBC News. (2014). *“Konflik agama di Afrika Tengah 'tewaskan 75’”*. Diakses dari: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/14_0204_afrika_sektarian.amp
- Bentuk-bentuk Konflik. Diakses dari: https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/bentukbentuk_konflik.html
- Bundeszentrale für politische Bildung. *Effects of War*. Diakses dari: <https://warpp.info/en/m1/articles/effects-of-war>
- DAG Hammarskjöld Library. (2022). *“What is an Advisory Opinion of the International Court of Justice (ICJ)?”*. Website. Diakses dari: <https://ask.un.org/faq/208207>
- Daniel Forti. (2022). *“The 2022 UN Peacekeeping Budget: Signs of Progress or a Fleeting Moment of Consensus?”*. IPI Global Observatory. Diakses dari: <https://theglobalobservatory.org/2022/07/2022-un-peacekeeping-budget/>
- Dimas Cahyokusuma. (2018). *Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung Perdamaian bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu dan masyarakat*. Artikula.id. diakses dari: <https://artikula.id/dimassigitcahyo/memaknai-perdamaian-bersama-johan-galtung/>
- DQ Lab. (2020). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Diakses dari: <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- DQ Lab. (2022). *“Teknik Analisis Data Mengenal Data Kualitatif vs Kuantitatif”*. <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-mengenal-data-kualitatif-vs-kuantitatif#:~:text=Data%20kualitatif%20merupakan%20data%20yang,untuk%20penelitian%20yang%20berbau%20scientist.>

- Espen Beer Prydz & Divyanshi Wadhwa. (2019). "Classifying countries by income". The World Bank. Diakses dari: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/the-classification-of-countries-by-income.html>
- Evan Schneider. (2022). "New UN General Assembly President highlights 'solidarity, sustainability and science'". United Nations News. <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126561>
- European Commission. (2021). "Questions and Answers: A new EU policy in support of Disarmament, Demobilisation and Reintegration of former combatants". Diakses dari: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6923
- Florent Vergnes. (2022). "Ivory Coast withdrew from the UN peacekeeping force in Mali". Al-Jazeera. Diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/11/16/ivory-coast-to-withdraw-from-mali-peacekeeping-force-letter>
- Gabriela Lucuta. (2014). "Peacemaking, peacekeeping, peacebuilding and peace enforcement in the 21st century". Peace Direct Article. Diakses dari: <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peacemaking-peacekeeping-peacebuilding-peace-enforcement-21st-century/?location=&theme=>
- Gracia Carolina. (2022). Metode Penalaran Deduktif dan Induktif – Deduksi vs Induksi. Diakses dari: <https://www.zenius.net/blog/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif>
- Hukumonline. (2022). "Kamus: Konflik bersenjata". Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/kamus/k/konflik-bersenjata>
- IEP Peace Academy. "Defining the Concept of Peace » Positive & Negative Peace". Diakses dari: <https://www.visionofhumanity.org/defining-the-concept-of-peace/>
- IEP Peace Academy. "How was the Global Peace Index (GPI) Founded in 2007?". Diakses dari: <https://www.visionofhumanity.org/how-was-the-global-peace-index-founded/>
- Integrated Civil Society Organizations System. United Nations Department of Economics and Social Affairs NGO Branch. Diakses dari: <http://esango.un.org/civilsociety>.
- International Committee of the Red Cross. (2015) "What are jus ad bellum and jus in bello". Diakses dari: <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>
- International Court of Justice. "The Court". Website. Diakses dari: <https://www.icj-cij.org/en/court>
- John Paul Lederach & Katie Mansfield. "What is Strategic Peacebuilding?". KROC Institute. University of Notre Dame. Diakses dari: <https://kroc.nd.edu/about-us/what-is-peace-studies/what-is-strategic-peacebuilding/#:~:text=Peacebuilding%20is%20the%20development%20of,conditions%20that%20generate%20deadly%20conflict>

- Joint Inspection Unit (JIU). Accountability Frameworks in the United Nations System. Diakses dari: <https://www.unjiu.org/content/accountability-frameworks-united-nations-system-1>
- Louise Fréchette. (2000). “Deputy Secretary-General Describes ‘Changing Landscape’ of Peacekeeping in Ottawa Address.” United Nations Press Release DSG/SM/96. Diakses dari: <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000608.dsgsm96.doc.html>.
- Merriam Webster Dictionary. “Peace”. Diakses dari: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/peace>
- Model United Nations. “Secretariat”. Diakses oleh: <https://www.un.org/en/model-united-nations/secretariat>
- Rifqani Hanif. (2020). “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34). 272nd meeting. Diakses dari: <https://media.un.org/en/asset/k19/k19lvlnbhl>
- Steps in the treaty-making process. United Nations University website. <https://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee09.htm>
- The United Nations Office at Geneva. “What is the difference between the official language and the working language?”. Diakses dari: <https://www.ungeneva.org/en/faq/542>
- UN. Department of Public Information. (1996). “The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping”. [ST/DPI/1800]. New York. p.4
- UN News. 2018. “Unrealistic demands on UN peacekeeping costing lives and credibility – Guterres”. Diakses dari: <https://news.un.org/en/story/2018/03/1006181>.
- United Nations IAAC. About the Committee. Diakses dari: <https://www.un.org/ga/iaac/>
- United Nations IAAC. Rules of procedure. Diakses dari: <https://www.un.org/ga/iaac/content/rules-procedure>
- United Nations Joint Inspection Unit. “About”. Diakses dari: <https://www.unjiu.org/content/about-jiu>
- United Nations. “Biography: Secretary General”. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography>
- United Nations Board of Auditors. “Mandate”. Diakses dari: <https://www.un.org/en/auditors/board/mandate.shtml>
- United Nations Board of Auditors. “UN organizations audited”. Diakses dari: <https://www.un.org/en/auditors/board/orgsaudited.shtml>
- United Nations General Assembly. “Administrative and Budgetary (Fifth Committee)”. Diakses dari: <https://www.un.org/en/ga/fifth/>
- United Nations General Assembly. “Committee for Program and Coordination”. <https://www.un.org/en/ga/cpc/legislative.shtml>

- United Nations. “*History of the UN*”. Diakses dari: <https://www.un.org/un70/en/content/history/index.html>
- United Nations Economic and Social Council. (2022). “*Biography: Her Excellency Lachezara Stoeva Seventy-eight President of the Economic and Social Council*”. Diakses dari: <https://www.un.org/ecosoc/en/content/biography>
- United Nations Peace, Dignity, and Equality on a Healthy Planet. “*Trusteeship Council*”. Diakses dari: <https://www.un.org/en/about-us/trusteeship-council>
- United Nations Peacekeeping. “*Building Rule of Law and Security Institution*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/building-rule-of-law-and-security-institutions>
- United Nations Peacekeeping. “*Deployment and Reimbursement*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/deployment-and-reimbursement>
- United Nations Peacekeeping. “*Disarmament, Demobilisation, and Reintegration*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/disarmament-demobilization-and-reintegration>
- United Nations. (2021). *Highlights Of Security Council Practice 2021*. Diakses dari: <https://www.un.org/securitycouncil/content/highlights-2021>
- United Nations Peacekeeping. “*How We Are Funded*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded>
- United Nations Peacekeeping. *Mandates and the Legal Basis of Peacekeeping*. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>
- United Nations Peacekeeping. “*MINURSO Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>
- United Nations Peacekeeping. “*MINUSCA Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>
- United Nations Peacekeeping. “*MINUSMA Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>
- United Nations Peacekeeping. “*MONUSCO Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco>
- United Nations Peacekeeping. “*Promoting Human Rights*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/promoting-human-rights>
- United Nations Peacekeeping. “*UNDOF Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/undof>
- United Nations Peacekeeping. “*UNFICYP Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unficyp>
- United Nations Peacekeeping. “*UNIFIL Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>
- United Nations Peacekeeping. “*UNISFA Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unisfa>
- United Nations Peacekeeping. “*UNMIK Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmik>
- United Nations Peacekeeping. “*UNMISS Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss>
- United Nations Peacekeeping. “*UNMOGIP Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmogip>

- United Nations Peacekeeping. “*UNTSO Fact Sheet*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso>
- United Nations Peacekeeping. “*Principles of Peacekeeping*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>
- United Nations Peacekeeping. “*Protecting Civilians*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians>
- United Nations Peacekeeping. “*The role of General Assembly*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/role-of-general-assembly>
- United Nations Peacekeeping. “*What do we do?*”. Diakses dari: <https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do>
- United Nations Security Council. (2023). *Resolution*. <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0>
- United Nations Security Council. (2023). “*Security Council Presidency*”. Diakses dari <https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency>
- United Nations Security Council. “*Subsidiary Organ Branch*”. Diakses dari: <https://www.un.org/securitycouncil/content/subsidiary-bodies>
- United Nations Security Council. “*Subsidiary Organs: Overview*.” Diakses dari: <https://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/subsidiary-organs-overview>
- United Nations. *Welcome to Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ)*. Diakses dari: <https://www.un.org/ga/acabq/>
- Universitas Medan Area. *Pengertian, Dampak dan Contoh dari Etnosentrisme*. Diakses dari: <https://barki.uma.ac.id/2021/11/13/pengertian-dampak-dan-contoh-dari-etnosentrisme/>

Laporan dan Dokumen

- Ball N. (2001). “*Human Security and Human Development: Linkages and Opportunities Geneva: Program for Strategic and International Studies*”, Graduate Institute of International Studies Report. p.723. diakses dari: http://www.humansecuritynetwork.org/report_may2001_3-e.asp
- Financial report and audited financial statements for the 12-month period from 1 July 2020 to 30 June 2021 and Report of the Board of Auditors: Volume II - United Nations peacekeeping operations (A/76/5)*.
- International Committee of the Red Cross. (2022). “*What is International Humanitarian Law?*”. Document of Advisory Service on International Humanitarian Law
- Pietro Vierri. (1992). “*Dictionary of The International Law of Armed Conflict*”. ICRC Publication.
- OIOS Internal Audit Division Report 2022/091. (2022). *Audit of warehouse operations in the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)*. Assignment No. AP2022-620-05.
- Spencer Dale. (2022). “*British Petroleum: Statistical Review of World Energy*”. London. 71st Edition
- The Brahimi Report*. (2000). (A/55/305-S/2000/809).

- The Report of the Secretary-General. (1973). *"The Implementation of Security Council resolution 340"*. (S/11052/Rev.1).
- United Nations Conduct in the Field Mission. *"Standard: Overview"*. Diakses dari: <https://conduct.unmissions.org/standards-overview>
- United Nations Department of Peacekeeping Operations/Department of Field Support. (2017). *"Core Pre-Deployment Training Materials, Member State Guidance"*. p.37. diakses dari: <https://research.un.org/revisedcptm2017>
- United Nations Document. (1952). (A/RES/686(VII)). Rapat Pleno ke-400. 5 December 1952.
- United Nations Document. (2008). *"United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines"*. New York
- United Nations Document. (2000). *Panel on United Nations Peace Operations, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305, S/2000/809*,
- United Nations Document. (2022). General Assembly Resolution (A/RES/76/239). *"Scale Of Assessments for The Apportionment of The Expenses Of United Nations Peacekeeping Operations"*.
- United Nation General Assembly. (2010). *"Towards an Accountability System in the United Nations Secretariat—Report of the Secretary-General"*. (UN Doc. A/64/640).
- United Nations Office of Internal Oversight Services. *"Inspection Evaluation Report"*. Diakses dari: <https://oios.un.org/inspection-evaluation-reports>
- United Nations Office of Internal Oversight Services. Diakses dari: <https://oios.un.org/>
- United Nations Peacekeeping. *Standard of Conduct*. <https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct>.
- United Nations Report of the Secretary-General. *"Summary study of the experience derived from the establishment and operation of the force"* (1958). (A/3943) of 9 Oct. 1958.
- Vidya Prahassacitta. (2019). Penelitian Hukum Normatif & Penelitian Hukum Yuridis. Diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

Lainnya

- Activities of the Independent Audit Advisory Committee for the period from 1 August 2019 to 31 July 2020. (2020). *Report of the Independent Audit Advisory Committee* (A/75/293). <https://www.un.org/ga/iaac/content/activities-independent-audit-advisory-committee-period-1-august-2019-31-july-2020-report>
- Amegashie. et al. (2008) *"The Desire for Revenge and the Dynamics of Conflicts"*. MPRA Paper No. 6774. University of Guelph. Canada. p.16

- Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat*. (2016). (ST/IC/2016/25).
- Bukkan Sani. (2010). *Logistical Support to Peacekeeping Operations: Challenges and Prospects of Air Support*. A Thesis Presented in Partial Completion of The Requirements Of The Certificate-Of-Training IN United Nations Peace Support Operations
- Dietrich Schindler. (1979). *The Difference Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Additional Protocols, Recueil de Cours-Collected Course of the Hague Academy of International Law*.: Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Consulted online on 13 April 2023. Diakses dari: http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028609303_03. p.153
- Ensiklopedia Holocaust. “*Perang Dunia II di Eropa: Artikel Ringkas*”. Diakses dari: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/world-war-ii-in-europe-abridged-article>
- Fierda Rachmawati. (2010). *Peacekeeping Operations PBB pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008*. Thesis: FISIP Universitas Indonesia.
- Interview of Kathleen Lawand-the outgoing head of the ICRC. (2012). *Internal conflicts or other situations of violence – what is the difference for victims?* Diakses dari: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm#:~:text=A%20non%2Dinternational%20>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kofi Annan's annual speech to the General Assembly. (1999). (SG/SM/7126)
- Laporan JIU JIU/REP/2006/1. (2006). *Evaluation Of Results-Based Budgeting In Peacekeeping Operations*.
- Letter dated 21 December 2017 from the Permanent Representative of Senegal to the United Nations addressed to the President of the Security Council*. (S/2017/1087)
- Merriam Webster Dictionary. Resolution. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/resolution>
- Nisa Hasna Nabila & Prof. Dr. Budi Winarno, MA. (2014). “*Penerapan Prinsip Responsibility to Protect Sebagai Konsep Resolusi Konflik*”. Thesis FISIPOL. Universitas Gadjah Mada.
- Secretary-General’s Bulletin. “*Information Sensitivity, Classification and Handling*” (ST/SGB/2007/6).